



EDISI KAMIS 22 OKTOBER 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

TODAY

02
05
10GOVERNMENTTODAY
Prabowo ke MSCI: Kita Lawan, Indonesia
Tak Akan GentarNUSANTARA
Beras Fortifikasi Abal-abal: Konsumen Rugi
TriliunanLISTSTYLE
Makeup Flawless di Segala Usia Jangan Tutupi
Semua Kerutan

Dua Tahun Prabowo-Gibran MBG KEMBALI MEMAKAN KORBAN

Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai persoalan keamanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pada Rabu (21/10/2026), dugaan keracunan di Kota Cirebon, Jawa Barat, dilaporkan berdampak pada 270 orang, terdiri atas 231 anak dan 39 orang dewasa. Pada hari yang sama, 103 siswa SMPN 2 Cisarua, Kabupaten Bogor, juga mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan konsumsi MBG. Penyebab kedua kejadian masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan telah menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terkait dengan kejadian di Cirebon. Deputy Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, mengatakan prioritas penanganan saat ini adalah pemulihan kesehatan korban. BGN juga membuka kemungkinan penghentian permanen operasional dapur atau pemutusan kerja sama dengan mitra apabila kasus masuk kategori berat. Sementara itu, biaya penanganan medis korban di Cirebon akan ditanggung BGN. Kasus tersebut muncul sehari setelah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan empat agenda pembenahan MBG, termasuk penataan SPPG serta peningkatan keamanan dan mutu makanan. Kepala BGN Sudaryono juga mengungkapkan uji coba pengawasan dapur melalui CCTV yang terhubung ke pusat dengan bantuan kecerdasan buatan untuk memantau kepatuhan terhadap standar operasional prosedur. Di tengah perluasan program unggulan pemerintah, kejadian di Cirebon dan Bogor kembali menyoroti tantangan memastikan makanan yang dibagikan kepada anak-anak dan kelompok rentan aman dikonsumsi. BERSAMBUNG HAL.11

DUGAAN KERACUNAN MBG

KOTA CIREBON

- 270 orang dilaporkan terdampak dugaan keracunan.
- Terdiri atas 231 anak dan 39 orang dewasa.
- Gejala: mual, muntah, pusing, sakit perut, dan diare.
- Dugaan awal mengarah pada menu telur puyuh; penyebab menunggu hasil laboratorium.
- SPPG terkait dihentikan sementara.
- BGN menyatakan biaya penanganan medis korban ditanggung pemerintah.

CISARUA, KABUPATEN BOGOR

- 103 siswa SMPN 2 Cisarua dilaporkan mengalami gejala.
- Keluhan: lemas, mual, muntah, dan pusing.
- Dugaan awal mengarah pada susu dalam paket MBG.
- SPPG terkait dihentikan selama 20 hari untuk evaluasi.
- Sampel diperiksa di laboratorium.

JANJI PEMBENAHAN PEMERINTAH

- | | | | |
|---|--------------------------|---|--|
| Mempercepat pemerataan MBG di wilayah 3T. | Menata tata kelola SPPG. | Meningkatkan keamanan dan mutu makanan. | Membenahi data penerima manfaat serta menindak penyimpangan. |
|---|--------------------------|---|--|

Karo, Sumatera Utara | Agustus

- 353 siswa terdampak dalam satu kejadian. Ombudsman Sumut mencatat 789 anak mengalami keluhan terkait MBG sepanjang 2026 pada periode laporan tersebut.

Rembang, Jawa Tengah | September

- 777 siswa dan guru dilaporkan terdampak.

Sidoarjo, Jawa Timur | September

- 664-730 santri dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi MBG.

Trenggalek, Jawa Timur | September

- 77 siswa dan guru terdampak; SPPG terkait dilaporkan disanksi penghentian operasional selama 30 hari.

Kolase foto kepanikan di rumah sakit setempat saat ratusan anak diduga keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/10/2026) malam. (Ist)



PRABOWO KE MSCI: KITA LAWAN, INDONESIA TAK AKAN GENTAR

Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan keras kepada Morgan Stanley Capital International (MSCI) di tengah gejolak pasar modal Indonesia. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026), Prabowo menuding lembaga penyedia indeks saham global itu berusaha menakut-nakuti Indonesia.

PERGERAKAN IHSG (13 - 21 OKTOBER 2026)

13 Okt	5.925,98 (-79,24 Pts)
14 Okt	5.943,02 (+49,47 Pts)
15 Okt	5.863,78 (-678,68 Pts)
19 Okt	4.996,61 (-188,49 Pts)
20 Okt	5.278,89 (+282,28 Pts)
21 Okt	5.328,36 (+282,28 Pts)



naif atau berupaya menyenangkan semua pihak ketika kepentingan nasional sedang dipertaruhkan.

"Kita tidak bisa lagi menghadapinya dengan terlalu naif atau terlalu berusaha untuk menyenangkan orang lain," kata Prabowo.

Ia menekankan perlunya keberanian menghadapi kenyataan, termasuk dalam menjaga kekayaan bangsa dan kepentingan rakyat Indonesia.

IHSG 'Hijau', Rupiah Terpuruk

Pernyataan Presiden itu muncul setelah MSCI membuka konsultasi mengenai kemungkinan menurunkan klasifikasi pasar saham Indonesia dari emerging market atau pasar berkembang menjadi standalone market. Kategori tersebut berada dua tingkat di bawah klasifikasi Indonesia saat ini, dengan negara seperti Zimbabwe, Nigeria, Lebanon, dan Ukraina berada dalam kelompok pasar mandiri tersebut.

Ancaman itu bukan tanpa dampak. Pada Jumat (16/10), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat mengalami penghentian perdagangan sementara atau trading halt setelah anjlok lebih dari 8 persen pada awal sesi. IHSG kemudian ditutup melemah 11,57 persen ke level 5.185,105, menjadi penurunan harian terdalam sejak Januari 1998 menurut laporan BBC News Indonesia.

Diketahui, IHSG Rabu (21/10/2026) ditutup di level 5.328 menguat 49 poin atau 0,94 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), sebanyak 369 saham ditutup menguat, sementara 308 saham melemah dan 116 saham stagnan.

Aktivitas perdagangan tercatat ramai dengan volume mencapai 35 miliar saham. Nilai transaksi mencapai Rp17 triliun dengan frekuensi 1,8 juta kali transaksi.

Seiring dengan menguatnya IHSG, kapitalisasi pasar BEI naik menjadi Rp9.400 triliun dari Rp9.307 triliun pada perdagangan sebelumnya.

Di sisi lain, nilai tukar Rupiah melemah hari ini. Mengutip data, Rupiah ditutup di level Rp18.022 per Dolar AS, melemah 30 poin atau 0,17 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya.

Pelemahan ini terjadi setelah Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga di level 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 20-21 Oktober 2026.

Sejalan dengan keputusan tersebut, BI juga mempertahankan lending facility di level 6,5 persen, dan menaikkan suku bunga deposit facility ke level 5 persen.

Sebelumnya, MSCI menyoroti persoalan transparansi kepemilikan saham, konsentrasi kepemilikan, dan dugaan praktik perdagangan terkoordinasi. Pada 15 Oktober 2026, lembaga itu membuka konsultasi atas usulan penurunan status Indonesia. Konsultasi berlangsung hingga 30 April 2027, sedangkan keputusan akhir dijadwalkan diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.

Di tengah tekanan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan sanksi dengan total

nilai Rp2,1 triliun terkait temuan pelanggaran di pasar saham. Sanksi itu mencakup denda Rp1,5 triliun terkait manipulasi perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), serta Rp500 miliar terhadap pihak terkait penjabatan saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dan Rp100 miliar untuk PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN).

OJK menyatakan pemeriksaan perdagangan DSSA periode 2024-2026 menemukan manipulasi pasar yang dilakukan secara terencana dan terstruktur sehingga menyebabkan harga saham meningkat signifikan.

GIC dan Temasek Membantah

Dua dana investasi milik negara Singapura, Government of Singapore Investment Corporation (GIC) dan Temasek, membantah tuduhan ikut menekan Morgan Stanley Capital International (MSCI) agar menurunkan klasifikasi pasar saham Indonesia. Bantahan itu merespons unggahan mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di media sosial pada 20 Oktober 2026 yang menduga kedua investor tersebut mendorong penurunan peringkat untuk menciptakan peluang membeli saham Indonesia dengan harga lebih murah.

Juru bicara GIC menegaskan keputusan investasi lembaganya tidak didasarkan pada klasifikasi indeks atau pandangan pasar secara keseluruhan. "Keputusan investasi kami tidak didorong oleh klasifikasi indeks atau pandangan pasar dari atas ke bawah, melainkan oleh fundamental tingkat perusahaan dan aset," demikian pernyataan yang dikutip The Straits Times dan The Business Times, Rabu (21/10/2026).

GIC juga menyatakan telah berinvestasi di Indonesia selama lebih dari 30 tahun di berbagai kelas aset dan akan terus mencari peluang investasi yang sesuai dengan risikonya.

Sementara itu, Kepala Asia Pasifik Temasek Global Investments, Fock Wai Hoong, menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak benar. "Tidak seorang pun dari Temasek, baik institusi maupun individu yang bekerja untuk institusi tersebut, pernah menghubungi MSCI untuk memengaruhi keputusan apa pun yang mereka buat terkait pertukaran apa pun di wilayah ini," ujarnya. (tin,ist,blo/dya)

TENGGAT PEMBENTUKAN TIM SELEKSI KPU-BAWASLU TERLEWAT

Pemerintah belum mengumumkan pembentukan tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2027–2032 hingga Rabu (21/10/2026). Padahal, tenggat pembentukan tim seleksi telah terlewati sejak 12 Oktober lalu. Keterlambatan ini memicu kritik dari pakar hukum pemilu dan politikus, sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan pemerintah terhadap undang-undang di tengah proses revisi UU Pemilu yang sedang berjalan di DPR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, presiden harus membentuk tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu paling lambat enam bulan sebelum masa jabatan komisioner berakhir. Dengan masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022–2027 yang berakhir pada 12 April 2027, tim seleksi semestinya sudah dibentuk paling lambat 12 Oktober 2026. Namun, hingga sembilan hari setelah tenggat tersebut, pemerintah belum mengumumkan pembentukannya.

Pakar hukum pemilu dan tata negara Titi Anggraini menilai keterlambatan tersebut sebagai persoalan serius karena pembentukan tim seleksi merupakan perintah undang-undang. Ia mengingatkan, ketidakpatuhan sejak tahap awal pergantian penyelenggara pemilu dapat memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

“Penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu di tingkat nasional yang sudah harus dibentuk tim seleksinya pada 12 Oktober lalu, enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan KPU dan Bawaslu, yaitu pada 12 April 2027, itu sampai hari ini belum dibentuk, padahal perintah undang-undang,” kata Titi, dikutip Rabu (21/10).

Sorotan terhadap keterlambatan tersebut juga datang dari Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun. Ia mempertanyakan konsistensi penerapan hukum ketika pemerintah belum menjalankan tahapan pergantian penyelenggara pemilu sesuai tenggat yang ditentukan. “Nah itu masalah serius kita. Kita ini selalu bicara tentang negara hukum, tapi konsistensi terhadap hukum juga tidak ada. Konstitusi orang tabrak, apalagi undang-undang,” ujar Komarudin kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (21/10).

Komarudin juga menyoroti pembahasan revisi UU Pemilu yang menurutnya semestinya dipersiapkan jauh-jauh hari agar



(Ilustrasi) Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) menata kotak suara. (Dok)

tidak berbenturan dengan tahapan rekrutmen penyelenggara pemilu. “Jadi mestinya undang-undang pemilu ini sudah dibahas jauh-jauh hari. Sekarang itu sudah proses rekrutmen seleksi KPU,” katanya.

Ia berharap ada instrumen aturan yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan tersebut, tetapi menegaskan bahwa penyelesaiannya tetap harus berlandaskan hukum. “Tapi ya pasti ada instrumen aturan yang dipakai untuk mengatasi itu. Tapi sebagai negara hukum, mestinya orang tetap taat terhadap hukum. Kalau tidak, kacau terus,” ujarnya.

Di sisi lain, revisi UU Pemilu memang sudah memasuki proses formal di DPR. Komisi II DPR mengesahkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang Pemilu pada 29 September 2026.

Ketua Komisi II DPR, M. Rifqinizamy Karsayuda, ketika itu menyatakan pembentukan Panja menandai dimulainya proses revisi secara formal melalui mekanisme legislasi di DPR. Pada 8 Oktober, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menyampaikan bahwa pembentukan Panja bertujuan memperlancar penyusunan regulasi sekaligus memastikan materi revisi dibahas dengan mempertimbangkan demokrasi, kedaulatan rakyat, kepastian hukum, dan

penyelenggaraan pemilu yang jujur serta adil.

Pembahasan revisi tersebut menjadi konteks penting karena Komisi II DPR, menurut laporan pemerintah diduga menunggu perkembangan revisi UU Pemilu sebelum membentuk tim seleksi. Namun, dugaan tersebut belum dapat dipastikan sebagai alasan resmi pemerintah.

Belum ada keterangan pemerintah yang terkonfirmasi dalam bahan pemberitaan yang tersedia mengenai penyebab keterlambatan ataupun keputusan yang akan ditempuh untuk menyelesaikannya.

Perkembangan ini juga memperlihatkan adanya dua proses yang berjalan berdekatan: penyusunan aturan baru untuk pemilu mendatang dan persiapan pergantian anggota lembaga penyelenggara pemilu.

Pada 8 Oktober 2026, DPR menyatakan Panja RUU Pemilu akan menghimpun masukan berbagai pihak dan membuka ruang partisipasi publik. Sementara itu, tahapan seleksi KPU dan Bawaslu tetap memiliki tenggat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Karena itu, belum selesainya revisi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa proses seleksi dapat ditunda tanpa dasar hukum.

Sesuai Pasal 22 UU Nomor 7

SELEKSI KPU-BAWASLU 2027–2032

12 Oktober 2026:

- Batas akhir pembentukan Tim Seleksi (Timsel) berdasarkan UU Pemilu

11 April 2027:

- Masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022–2027 berakhir
- Dasar hukum: Pasal 22 ayat (8) dan Pasal 118 ayat (8) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

21 Oktober 2026:

- Pemerintah belum mengumumkan pembentukan Timsel, melewati tenggat yang ditentukan undang-undang.

DUA SKENARIO PEMBENTUKAN TIMSEL

Mengacu UU Pemilu yang Berlaku

- Timsel dibentuk paling lambat 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- Target pembentukan: 12 Oktober 2026.
- Anggota baru diseleksi sebelum 11 April 2027.

Mengikuti Wacana Revisi UU Pemilu

- Pembentukan Timsel diusulkan setelah Maret 2027.
- Menunggu perkembangan revisi UU Pemilu di DPR.
- Tahapan seleksi diwacanakan dipangkas dari 6 bulan menjadi 3 bulan.

Tahun 2017, tim seleksi calon anggota KPU dibentuk presiden dengan jumlah paling banyak 11 orang dan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.

Ketentuan mengenai pembentukan tim seleksi dan tahapan rekrutmen menjadi dasar bagi pergantian komisioner. Proses seleksi selanjutnya mencakup pendaftaran, pemeriksaan administrasi, tes tertulis, tes psikologi, tes kesehatan, dan wawancara. Tim seleksi kemudian menyampaikan nama-nama calon sesuai mekanisme yang ditentukan undang-undang untuk diproses lebih lanjut hingga pemilihan anggota KPU dan Bawaslu.

Keterlambatan pembentukan tim seleksi kini menyisakan persoalan kepastian jadwal rekrutmen menjelang berakhirnya masa jabatan komisioner pada April 2027. Di tengah pembahasan revisi UU Pemilu, pemerintah perlu menjelaskan alasan belum dibentuknya tim seleksi dan memastikan mekanisme pergantian penyelenggara pemilu tetap berjalan sesuai ketentuan. (gus,ist,ktn/dya)

314 RIBU KASUS ISPA DI WILAYAH KARHUTLA, 70 RIBU DIANTARANYA BALITA

Kemenkes mencatat 314.124 kasus ISPA di tujuh provinsi terdampak hingga 20 Oktober 2026. Di tengah dampak kesehatan. Di sisi lain, Polri menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka karhutla, sementara Kemenhut menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia tidak hanya menyisakan persoalan lingkungan, tetapi juga meningkatkan risiko kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 314.124 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi terdampak selama periode 20 Agustus–20 Oktober 2026. Dari jumlah itu, 70.890 kasus atau 22,6 persen dialami anak berusia 0–5 tahun.

Data tersebut mencakup 65 kabupaten/kota. Pada 20 Oktober saja, terdapat 3.269 kasus baru. Sebanyak 243.234 kasus atau 77,4 persen tercatat pada kelompok usia di atas lima tahun. Angka ini merupakan jumlah kasus ISPA yang tercatat di wilayah terdampak karhutla, bukan bukti bahwa seluruh kasus telah dipastikan disebabkan langsung oleh kebakaran.

Sumatera Selatan mencatat kasus terbanyak, yakni 82.177 kasus. Berikutnya, Kalimantan Selatan dengan 78.894 kasus, Kalimantan Barat 55.686 kasus, Riau 36.433 kasus, Kalimantan Timur 27.688 kasus, dan Kalimantan Tengah 26.740 kasus.

Dampak kesehatan yang dilaporkan tidak terbatas pada ISPA. Sejumlah wilayah juga mencatat kasus pneumonia, diare akut, penyakit kulit, gangguan mata, influenza-like illness (ILI), dan heat stroke. Kalimantan Tengah melaporkan 1.400 kasus pneumonia dan 81 kasus ILI. Sementara itu, Kalimantan Barat mencatat 4.314 kasus diare akut. Di Riau, terdapat 720 kasus penyakit kulit, 232 kasus gangguan mata, dan 52 kasus heat stroke.

Untuk mengantisipasi dampak asap, pemerintah mengerahkan tenaga kesehatan dan menyalurkan bantuan medis ke sejumlah daerah. Hingga 20 Oktober 2026 pukul 15.00 WIB, jumlah rumah oksigen yang dilaporkan tersedia mencapai 295 di Kalimantan Tengah, 127 di Kalimantan Selatan, dan 35 di Kalimantan Barat.

Tenaga kesehatan yang dikerahkan antara lain 3.938 orang di Kalimantan Timur, 1.411 orang di Jambi, dan 487 orang di Kalimantan Tengah.

Dalam periode 19 Agustus–20 Oktober, bantuan yang disalurkan mencakup 1.001.680 masker bedah, 89.050 masker N95, 40.000 sarung



Orang tua dari pasien anak penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) menunggu anaknya yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) BARI Palembang, Sumatera Selatan. (dok. ant)

tangan medis, 3.632 kacamata pelindung, 3.250 kanula hidung, 2.450 alat oksigen hidung, 800 masker nebulizer, dan 200 masker oksigen.

Kemenkes juga menyalurkan obat-obatan, antara lain 448.600 obat diare, 60.700 antihistamin, 34.560 obat batuk, 24.900 bronkodilator, 4.500 obat penurun demam, 4.200 kortikosteroid, dan 1.050 antibiotik. Bantuan berupa oksigen, vitamin, serta salep turut dikirimkan.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muharman, mengimbau masyarakat mengurangi paparan asap dengan membatasi aktivitas di luar ruangan jika memungkinkan.

“Tetap di rumah, bekerja atau bersekolah secara online bila memungkinkan, kecuali bagi pekerja lapangan atau layanan publik,” kata Aji, seperti dikutip Rabu (21/10).

Ia menyarankan masyarakat menggunakan masker N95 atau KN95. Jika tidak tersedia, masyarakat dapat memakai masker medis atau masker kain secara berlapis. “Gunakan dengan benar, rapat menutup hidung dan mulut,” ujarnya.

Aji juga mengingatkan pentingnya menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, memenuhi kebutuhan cairan, dan beristirahat cukup.

Dari 11 Tersangka, 3 Pihak Asing

Di tengah upaya menangani dampak kesehatan, penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran karhutla juga berjalan. Kapolri

Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan Polri telah menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka. Tiga di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA).

Suyudi menyampaikan informasi tersebut sesuai Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10) malam. Ia belum mengungkapkan identitas perusahaan yang menjadi tersangka karena proses penyidikan masih berlangsung.

“Nanti akan dijelaskan,” kata Suyudi.

Kapolri juga menyebut Bareskrim Polri telah meningkatkan 98 laporan polisi terkait korporasi dalam perkara karhutla ke tahap penyidikan. Penyidik masih mengumpulkan alat bukti untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

Menurut Suyudi, pertanggungjawaban hukum tidak hanya berpotensi menasar perusahaan sebagai badan usaha, tetapi juga pemilik atau pemegang saham yang bertanggung jawab terhadap korporasi terkait.

“Pemilik perusahaan maupun juga para pemegang sahamnya, yang bertanggung jawab terhadap korporasi yang terkait dengan terjadinya karhutla di Indonesia,” ujarnya.

Kemenhut Sanksi 32 Perusahaan

Penindakan Polri berlangsung bersamaan dengan langkah administratif dan pidana Kementerian

ISPA DI WILAYAH KARHUTLA

314.124 kasus ISPA

- Periode: 20 Agustus–20 Oktober 2026
- Tersebar di 7 provinsi dan 65 kabupaten/kota
- Kasus baru pada 20 Oktober: 3.269

KELOMPOK USIA TERDAMPAK

- Usia 0–5 tahun: 70.890 kasus (22,6%)
- Usia di atas 5 tahun: 243.234 kasus (77,4%)

6 PROVINSI DENGAN KASUS ISPA TERBANYAK

- Sumatera Selatan: 82.177
- Kalimantan Selatan: 78.894
- Kalimantan Barat: 55.686
- Riau: 36.433
- Kalimantan Timur: 27.688
- Kalimantan Tengah: 26.740

Gangguan kesehatan lain yang dilaporkan

- Kalimantan Tengah: 1.400 kasus pneumonia; 81 ILI
- Kalimantan Barat: 4.314 kasus diare akut
- Riau: 720 penyakit kulit; 232 gangguan mata; 52 heat stroke

Kehutanan (Kemenhut). Berdasarkan data hingga 19 Oktober 2026, Kemenhut menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan. Pada saat yang sama, 125 subjek hukum, yang terdiri atas korporasi dan perorangan, sedang diproses secara pidana.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan bahwa pemegang izin usaha kehutanan wajib mencegah dan menangani kebakaran di areal kerjanya.

“Pemegang izin wajib menjalankan tanggung jawabnya dalam mencegah dan menangani kebakaran di areal kerjanya. Pelanggaran ditindak berdasarkan hasil pengawasan dan pembuktian. Penegakan hukum merupakan bagian dari upaya menghentikan kebakaran berulang dan memastikan pertanggungjawaban,” ujar Rohmat dalam keterangan resmi, Rabu (21/10).

Kemenhut memperketat pengawasan terhadap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBBPH), termasuk kewajiban pencegahan kebakaran, kesiapan personel dan sarana pemadaman, penanganan api, serta pemulihan kawasan.

Untuk mendukung operasi di lapangan, Kemenhut mengerahkan 1.419 personel Manggala Agni di enam provinsi prioritas dan memperbantukan 1.000 polisi kehutanan ke Kalimantan. Sebanyak 5.000 aparat sipil negara Kemenhut juga disiagakan untuk mendukung penanganan sesuai kebutuhan. (gus, ant, rls, ist/dya)

Beras yang dipasarkan dengan klaim tambahan gizi justru menjadi objek penyidikan Bareskrim Polri. Pada Rabu (21/10/2026), Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim menaikkan kasus dugaan ketidaksesuaian mutu dan kandungan gizi beras fortifikasi ke tahap penyidikan. Lima merek produk dari satu perusahaan diduga tidak memenuhi klaim padaemasannya. Di saat bersamaan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap temuan kandungan zinc berlebih pada sampel beras fortifikasi yang diperiksa di laboratorium.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Suhasto mengatakan, penyidik telah menemukan sedikitnya dua alat bukti berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan saksi, keterangan ahli, dan pengujian laboratorium. "Berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi, keterangan ahli, dan hasil lab, telah ditemukan minimal dua alat bukti, dan penyidik telah menaikkan status perkara ini dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan melalui proses gelar perkara tentunya," kata Suhasto dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan.

Namun, hingga konferensi pers tersebut, polisi belum menetapkan tersangka. Penyidik masih mendalami perkara dan melengkapi alat bukti. Dengan demikian, dugaan pelanggaran dalam produksi dan perdagangan beras fortifikasi tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Lima merek yang menjadi objek penyidikan ialah Idola Hijau Fortifikasi, Idola Merah Fortifikasi, Dewa Tunggal Raja Lele, Cantik Manis, dan Wijaya Kusuma. Kelimanya diproduksi PT DTA, perusahaan yang beroperasi di kawasan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Menurut Suhasto, sampel diambil petugas Bapanas yang telah memiliki sertifikasi, kemudian diuji di laboratorium. Hasilnya menunjukkan mutu dan kandungan gizi produk tidak sesuai dengan informasi pada label kemasan.

Penyidik telah memeriksa 12 saksi, termasuk pihak pelapor dari Bapanas, Direktur PT DTA, dan kepala produksi perusahaan tersebut. Polisi juga menyita 1.194 kemasan beras dengan berat total 6.405 kilogram.

Rinciannya terdiri atas 388 kemasan Idola Merah ukuran lima kilogram, 190 kemasan Idola Hijau ukuran lima kilogram, 148 kemasan Cantik Manis ukuran lima kilogram, 380 kemasan Dewa Tunggal Raja Lele ukuran lima kilogram, dan 87 kemasan Wijaya Kusuma ukuran 10 kilogram. Total estimasi nilai beras yang disita mencapai Rp155,2 juta. Polisi turut menyita satu lini mesin penggilingan beras atau rice milling unit dengan estimasi nilai Rp1 miliar.

BERAS FORTIFIKASI ABAL-ABAL: KONSUMEN RUGI TRILIUNAN

Bareskrim menyidik dugaan kecurangan lima merek beras fortifikasi produksi PT DTA. Hasil laboratorium menunjukkan kandungan gizi tak sesuai label. Sementara Bapanas mengungkap temuan zinc berlebih dan memperkirakan potensi kerugian konsumen mencapai Rp89 triliun.



Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Kombes Pol. Suhasto saat konferensi pers di kantornya, Rabu (21/10/2026). Ist

Produksi 2.500 Ton Senilai Rp69,9 M

Berdasarkan keterangan Bareskrim, PT DTA memproduksi sekitar 2,5 juta kilogram atau 2.500 ton beras fortifikasi selama April-Agustus 2026. Dengan asumsi harga jual rata-rata Rp18.100-Rp27.998 per kilogram, nilai ekonomis produksi tersebut diperkirakan mencapai Rp69,9 miliar. Angka itu merupakan nilai ekonomi produksi yang disampaikan penyidik, bukan jumlah kerugian yang telah diputus secara hukum.

Suhasto menjelaskan, beras fortifikasi pada dasarnya merupakan beras yang dicampur dengan bahan tambahan gizi. Menurut keterangannya, komposisi yang digunakan terdiri atas 99 persen beras premium dan satu persen zat khusus untuk penambahan gizi. Persoalannya, beras fortifikasi belum memiliki harga eceran tertinggi (HET), berbeda dengan beras premium dan medium yang memiliki ketentuan harga.

Ketiadaan HET khusus itu, menurut polisi, dapat membuka celah bagi pelaku usaha untuk menjual beras dengan harga lebih tinggi menggunakan klaim fortifikasi. Di pasaran, beras premium disebut memiliki HET Rp14.900 per kilogram

dan beras medium Rp13.500 per kilogram. Sementara itu, beras fortifikasi yang menjadi sorotan dipasarkan dengan harga sekitar Rp63.000-Rp138.000 per kemasan lima kilogram, setara Rp12.600-Rp27.600 per kilogram. Harga tersebut merupakan rentang yang diberitakan dalam pengungkapan perkara, bukan harga seluruh produk fortifikasi di pasaran.

"Bisa dibayangkan manakala seluruh beras premium ini diambil untuk fortifikasi, tinggal dicampurkan 1 persen saja zat sesuai keperluan, itu bisa berubah harganya. Fortifikasi tidak punya harga eceran tertinggi, tidak ada HET-nya. Jadi, berapa pun mereka mau menaikkan sesuai dengan profit produsen masing-masing. Terlebih pada labelemasannya ternyata tidak sesuai, nanti kan yang dirugikan masyarakat sendiri," kata Suhasto.

Polisi menerapkan sangkaan tindak pidana perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a, d, e, dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut berkaitan dengan larangan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar, mutu,

komposisi, atau keterangan yang dinyatakan pada label. Penetapan sangkaan tersebut belum berarti pihak yang diperiksa telah terbukti bersalah.

Di luar penyidikan terhadap lima merek, Bapanas menyampaikan temuan pengawasan yang lebih luas. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, mengatakan lembaganya telah melaporkan 25 merek dagang dan 11 pelaku usaha kepada Polri terkait dugaan ketidaksesuaian klaim kandungan gizi pada label beras fortifikasi.

Bapanas juga telah menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian produksi, penarikan produk dari peredaran, dan pencabutan izin edar terhadap 25 merek tersebut. "Jadi, ke-25 merek beras fortifikasi itu semuanya sudah diberikan itu, dan hari ini seharusnya barang itu sudah tidak ada di pasaran karena tidak memenuhi syarat," kata Andriko. Pernyataan itu merupakan keterangan pemerintah mengenai tindak lanjut pengawasan; ketersediaan produk di seluruh saluran penjualan tetap perlu dipastikan melalui pemantauan lapangan. (tin,ktn,ist/dya)

Tekan Inflasi, Pemkot Malang Tanam Cabai di Lahan 6.000 Meter Persegi

MALANG- Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menanam cabai untuk membantu mengendalikan inflasi, terutama saat harga komoditas tersebut mengalami kenaikan di pasaran. Bekerja sama dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sumber Rejeki di Kelurahan Merjosari, Pemkot Malang menanam sekitar 4.000 bibit cabai di lahan seluas 6.000 meter persegi.

"Ini dalam rangka pengendalian inflasi juga. Karena komoditas cabai ini sangat berpengaruh terhadap inflasi. Kita tahu sendiri, kalau harga cabai melambung, masyarakat menjerit," ujar Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Malang, Dandung Djulharjanto, Rabu (21/10/2026).

Menurutnya, lahan yang digunakan bukan merupakan lahan baru, melainkan bagian dari kebun jeruk yang dimanfaatkan untuk penanaman cabai dengan sistem tumpangsari. Tanaman cabai ditempatkan di sela-sela tanaman jeruk agar pemanfaatan lahan dan kegiatan pemeliharaan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Dandung berharap hasil panen

dalam 2-3 bulan mendatang dapat menambah pasokan cabai dan membantu menjaga stabilitas harga di pasar.

Lebih lanjut dijelaskannya, bibit cabai yang ditanam berasal dari pengadaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang melalui APBD 2025. Benih tersebut terlebih dahulu disemai hingga menjadi bibit yang siap ditanam.

Sementara itu, Ketua Gapoktan Sumber Rejeki, Heni Mariana, menyebut penanaman cabai pada musim kemarau menghadapi tantangan ketersediaan air. Menurutnya, petani berpotensi mengalami kekurangan air untuk memenuhi kebutuhan tanaman.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Gapoktan Sumber Rejeki mengaku terbantu dengan dukungan 9 unit pompa air dari Bank Indonesia (BI). Bantuan itu dinilai mendukung pengairan lahan sehingga kegiatan penanaman dapat dilakukan meski belum memasuki musim hujan.

Terpisah, Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, mengatakan

potensi lahan untuk komoditas cabai dan tomat di Kota Malang tersebar di dua wilayah. Di Kelurahan Merjosari, potensinya mencapai sekitar 30 hektare. Sementara itu, di wilayah Baran, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, luasnya sekitar 41,25 hektare. "Total potensi lahan di kedua wilayah tersebut mencapai 71,25 hektare," katanya.

Sebagian besar lahan pertanian untuk komoditas cabai dan tomat di Kota Malang, merupakan lahan tadah hujan. Sehingga petani yang tidak memiliki sumber air atau tandon umumnya baru memulai penanaman saat awal musim hujan.

Namun kondisi berbeda terjadi di



Pj Sekda Kota Malang, Dandung Djulharjanto melakukan penanaman cabai di lahan Gapoktan Sumber Rejeki, Kelurahan Merjosari, Kota Malang, Rabu (21/10/2026). (Santi/Lentera)

Merjosari. Ketersediaan air dari tandon memungkinkan petani memulai penanaman cabai pada musim kemarau, sehingga kegiatan budidaya tidak sepenuhnya bergantung pada curah hujan. (Santi/Dya)

DPRD Malang Usul Bantuan Rp10 Juta untuk Keberangkatan Pekerja Migran

Ilustrasi: Proses perekaman identitas calon pekerja migran Indonesia (PMI) di kantor Imigrasi. (foto: Kementerian Imigrasi dan Pemasaran)



MALANG- DPRD Kabupaten Malang menyiapkan alokasi anggaran Rp3,2 miliar dalam APBD 2027 untuk membantu biaya pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Melalui usulan tersebut, setiap calon PMI diharapkan mendapat bantuan Rp10 juta untuk meringankan biaya sebelum bekerja di luar negeri.

"Selama ini tidak ada kontribusi Pemerintah Kabupaten Malang untuk biaya jasa pemberangkatan dari calon

tenaga kerja tersebut. Makanya, di APBD 2027 belum dialokasikan. Kita mau dorong di 2027 ada alokasi," ujar Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq, Rabu (21/10/2026).

Menurutnya, bantuan Rp10 juta dapat mengurangi beban biaya yang harus ditanggung calon PMI. Jika total biaya pemberangkatan mencapai Rp30 juta, calon pekerja diharapkan hanya perlu menanggung sekitar Rp20 juta. "Sehingga tinggal Rp20 juta menjadi bebannya mereka," tambahnya.

"Maka ini nanti dialokasikan, Pemerintah Kabupaten Malang hanya butuh uang Rp3 miliar 200. Akan kita kawal, kita alokasikan agar beban untuk tanggungan ketika dia menjadi TKI ringan," imbuhnya.

Ia menyebut bantuan ini direncanakan berlaku sama bagi PMI laki-laki maupun perempuan, tanpa membedakan negara tujuan. Sejumlah negara tujuan PMI asal Kabupaten Malang di antaranya Hong Kong dan Taiwan.

Meski demikian, ditegaskannya, besaran anggaran dan realisasi bantuan masih bergantung pada proses pengalokasian dalam APBD 2027. Legislatif berencana mengawal usulan tersebut agar dapat direalisasikan dan tepat sasaran.

Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah pengawasan terhadap perusahaan penempatan tenaga kerja. DPRD ingin memastikan bantuan pemerintah benar-benar mengurangi tagihan pemberangkatan yang harus dibayar calon PMI, bukan justru membuat pekerja tetap membayar biaya penuh.

"Kami nanti akan mendatangi PT-PT itu. Untuk memonitor dana ini sudah terpotong enggak ke mereka? Khawatirnya mereka dikasih bantuan tapi enggak memotong, kan kasihan. Tetap bayar penuh," tegasnya.

Zia menilai dukungan pemerintah daerah diperlukan karena PMI turut membantu perekonomian keluarga melalui penghasilan yang diperoleh di luar negeri. Kontribusi tersebut, menurutnya, juga berpotensi mendukung upaya pengurangan kemiskinan di Kabupaten Malang.

"Padahal mereka itu menyumbang

devisa bagi kita. Bahkan dengan adanya TKI ini sebenarnya membantu kemiskinan di Kabupaten Malang ini akan berkurang," tuturnya.

Terkait jumlah calon penerima, Zia menyebut perkiraan awal dalam pembahasan mencapai 3.200 PMI per tahun. Sementara itu, jumlah yang tercatat melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang disebut sekitar 2.700 orang.

Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Malang, Yudhi Hindharto, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap PMI, terutama untuk memenuhi kebutuhan sebelum keberangkatan.

"Karena banyak komponen pembiayaan, teman-teman PMI ini kami bantu untuk pelatihan, pengurusan dokumen-dokumen pemberangkatan visa," ujar Yudhi.

Dijelaskannya, bantuan direncanakan diberikan kepada PMI yang dipastikan berangkat ke negara tujuan. Tidak ada pembatasan khusus berdasarkan negara tujuan, sedangkan kepastian keberangkatan akan menjadi bagian dari mekanisme penyaluran. (Santi/Dya)

PASUKAN KORUT DI PERBATASAN KORSEL SIAGA POSISI TEMBAK, MENGAPA?

Korea Utara (Korut) mengumumkan pengerahan unit-unit militer ke posisi tembak di perbatasan dengan Korea Selatan (Korsel), di tengah meningkatnya ketegangan kedua negara setelah ledakan ranjau darat di Zona Demiliterisasi (DMZ) melukai sejumlah tentara Korsel. Pyongyang membantah tuduhan Seoul yang menyebut Korut sebagai pihak yang memasang ranjau tersebut.

Pengumuman itu disampaikan Kim Yo Jong, adik pemimpin Korut Kim Jong Un, sebagaimana dilaporkan media pemerintah Korea Utara dan dikutip AFP pada Rabu (21/10/2026). Ia mengatakan, pimpinan militer Korut menekankan perlunya menunjukkan kesiapan pasukannya menghadapi pihak yang dianggap bermusuhan.

“Pimpinan militer kami menekankan perlunya menyadarkan kelompok jahat tersebut bahwa unit-unit pasukan tembak kami telah menempati posisi tembak mereka,” kata Kim Yo Jong.

Pernyataan tersebut muncul sehari setelah Korea Selatan memperingatkan akan memberikan respons tegas jika Korut kembali melakukan provokasi. Sebelumnya, Pyongyang juga menyatakan sedang mempertimbangkan pengerahan sarana serangan tambahan ke wilayah perbatasan.

Kim Yo Jong menyebut Kim Jong Un telah memerintahkan penguatan pertahanan perbatasan. Menurut dia, pemimpin Korut itu menginginkan perbatasan dengan negara yang dianggap musuh menjadi “benteng yang tak tertembus selamanya”.

Di sisi lain, kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA), melaporkan Marsekal Pak Jong Chon dari Angkatan Bersenjata Korea Utara telah memeriksa sejumlah posisi penting di perbatasan. Laporan itu memperlihatkan bahwa penguatan militer menjadi bagian dari respons Pyongyang terhadap memburuknya hubungan dengan Seoul.

Ketegangan meningkat sejak bulan lalu setelah ledakan ranjau darat di DMZ melukai tentara Korea Selatan. Seoul menuding Korea Utara bertanggung jawab atas pemasangan ranjau tersebut, tetapi Pyongyang membantah tuduhan itu. Kedua pihak belum menunjukkan tanda-tanda meredakan perselisihan melalui pernyataan yang dikutip dalam laporan tersebut.

DMZ merupakan kawasan perbatasan yang memisahkan kedua Korea dan berada di bawah pengamanan ketat. Meski disebut zona demiliterisasi, kawasan ini menjadi salah satu titik paling sensitif di Semenanjung Korea karena berdekatan dengan wilayah pertahanan kedua negara.

Perkembangan terbaru tersebut



Media pemerintah Korea Utara merilis foto Kim Jong Un tak lama setelah rumor tentang kematiannya mulai menyebar secara daring. (ist)

menambah risiko eskalasi militer di kawasan. Pengerahan pasukan ke posisi tembak, ancaman respons tegas, serta kemungkinan penambahan sarana serangan dapat mempersempit ruang bagi kedua negara untuk meredakan ketegangan. Namun, pengumuman kesiapan militer

tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa bentrokan terbuka telah terjadi.

Diketahui insiden ranjau melukai tiga tentara Korsel. Sementara Seoul menyebut aktivitas pembangunan benteng perbatasan Korut telah berlangsung sejak April 2024.

Kabar Tewasnya Kim Jong Un Dibantah dengan Foto

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dikabarkan meninggal dunia setelah mengalami pendarahan otak parah. Kabar tersebut beredar di media sosial pada pertengahan Oktober 2026 dan menyebut Kim sempat koma sebelum dibawa ke Beijing, China, untuk mendapatkan perawatan darurat. Namun, klaim itu belum didukung bukti yang dapat diverifikasi dan diragukan oleh pejabat Korea Selatan.

Di tengah spekulasi tersebut, media pemerintah Korea Utara dilihat Rabu (21/10/2026) justru merilis foto-foto yang memperlihatkan Kim sedang mengunjungi pameran pakaian dan alas kaki di Pyongyang pada Senin, 19 Oktober 2026. Foto-foto itu dipublikasikan kantor berita resmi Korea Utara, Korean Central News Agency (KCNA), pada Selasa, 20 Oktober 2026. Kim terlihat bersama putrinya, Kim Ju Ae, istrinya, Ri Sol Ju, serta sejumlah pejabat partai dan pemerintah.

Dalam sejumlah foto, Kim tampak

memeriksa berbagai produk yang dipamerkan. Salah satu gambar memperlihatkan dirinya memperhatikan sepatu anak-anak berwarna merah muda yang dipegang putrinya. Foto lainnya menunjukkan Kim mengamati pakaian yang dipajang pada manekin.

Kemunculan Kim di media pemerintah tersebut terjadi beberapa jam setelah Wan Jun Xie, seorang pembangkang China yang tinggal di Amerika Serikat, menyebarkan klaim bahwa pemimpin berusia 42 tahun itu mengalami pendarahan otak parah dan kehilangan kesadaran. Xie mengaku sebagai ketua Partai Demokrat China, organisasi yang dilarang oleh otoritas Beijing.

Mengutip laporan Yonhap, Xie menyatakan Kim dibawa ke Peking Union Medical College Hospital di Beijing karena fasilitas medis Korea Utara dinilai tidak memadai untuk menangani kondisinya. Ia kemudian mengklaim Kim meninggal dunia dan

Reuters juga melaporkan ancaman Korut untuk mengaktifkan kembali siaran pengeras suara propaganda dan menambah persenjataan taktis di perbatasan. (gus,rtr,cna/dya)

SIAPA PENERUS KIM JONG UN?

KIM JU AE

- Putri Kim Jong Un.
- Kian sering mendampingi ayahnya dalam acara penting.
- Dinilai sebagai kandidat penerus potensial, belum ditetapkan resmi.

KIM YO JONG

- Adik perempuan Kim Jong Un.
- Tokoh berpengaruh di lingkaran kekuasaan Korut.
- Belum ada penetapan resmi sebagai penerus.

ELITE PARTAI DAN MILITER

- Memiliki peran strategis dalam struktur kekuasaan.
- Dukungan mereka berpotensi menentukan transisi kepemimpinan.

TIGA GENERASI PEMIMPIN KOREA UTARA

KIM IL SUNG (1948-1994)

Pendiri Korea Utara. Menjadi perdana menteri pada 1948, lalu presiden pada 1972. Meninggal pada 8 Juli 1994.

KIM JONG IL (1994-2011)

Putra Kim Il Sung. Memimpin setelah ayahnya meninggal. Wafat pada 17 Desember 2011.

KIM JONG UN (2011-sekarang)

Putra Kim Jong Il. Mengambil alih kekuasaan pada Desember 2011 dan memimpin Korea Utara hingga kini.

jenazahnya diam-diam dipulangkan ke Korea Utara, sementara pemerintah berusaha menutupi kabar tersebut. Xie tidak menyertakan bukti yang bisa menguatkan klaimnya.

Pejabat diplomatik dan keamanan Korea Selatan mengatakan tidak memperoleh informasi yang mendukung kabar kematian Kim. Menurut laporan BBC, pejabat intelijen Korea Selatan juga menyampaikan kepada kantor berita Yonhap bahwa mereka tidak memiliki informasi yang mengonfirmasi laporan tersebut.

Meski foto-foto terbaru menunjukkan Kim masih tampil dalam kegiatan publik, waktu pengambilan gambar itu tidak dapat diverifikasi secara independen. Media pemerintah Korea Utara tidak secara langsung menanggapi rumor kematian tersebut. Karena itu, foto-foto tersebut menjadi petunjuk visual mengenai aktivitas Kim, tetapi tidak bisa diperlakukan sebagai verifikasi independen atas seluruh klaim mengenai kondisi kesehatannya. (gus,ist/dya)

Bloomscrolling, Cara Nikmati Medsos Tanpa Terjebak Berita Negatif

Bloomscrolling mengajak pengguna media sosial lebih sadar memilih konten positif dan inspiratif. Kebiasaan ini dapat menjadi alternatif doomscrolling yang berisiko memicu kecemasan dan kelelahan mental.

Media sosial bisa menjadi tempat mencari hiburan setelah seharian beraktivitas. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggulir layar selama berjam-jam juga dapat membuat seseorang terus terpapar berita buruk, konflik, hingga informasi yang memicu kecemasan. Di tengah kebiasaan tersebut, muncul istilah bloomscrolling, yakni aktivitas menjelajahi media sosial secara sadar untuk menemukan konten yang positif, menenangkan, dan menginspirasi.

Berbeda dengan doomscrolling yang merujuk pada kebiasaan terus-menerus mengonsumsi berita atau informasi negatif, bloomscrolling mengajak pengguna lebih selektif menentukan apa yang ingin dilihat. Tujuannya bukan menghindari kenyataan atau menutup mata terhadap persoalan di sekitar, melainkan menjaga keseimbangan antara kebutuhan memperoleh informasi dan kesehatan emosional.

Dikutip dari Real Simple, bloomscrolling merupakan tindakan sadar untuk mencari konten yang membangkitkan semangat, menampilkan keindahan, atau memberikan inspirasi. Bentuknya bisa berupa cerita tentang kebaikan, kegiatan kreatif, pemandangan alam, hingga pengalaman orang lain yang

memberikan perspektif positif. Ahli neuropsikologi Sanam Hafeez, PsyD, menekankan bahwa hal penting dalam bloomscrolling adalah kesadaran terhadap pengaruh konten yang dikonsumsi terhadap suasana hati.

Bedanya dengan Doomscrolling

Doomscrolling sering terjadi ketika seseorang terus mengikuti perkembangan berita buruk meskipun informasi yang dibaca membuatnya tidak nyaman. Keinginan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dapat mendorong seseorang terus menggulir layar, bahkan ketika ia sebenarnya ingin berhenti.

Situasi ini dapat membuat pengguna merasa lebih cemas, mudah tersinggung, dan kelelahan. Konsentrasi pun bisa terganggu ketika perhatian terus tersita oleh informasi negatif. Kebiasaan tersebut juga berpotensi menghabiskan waktu istirahat yang seharusnya digunakan untuk memulihkan energi. Dalam ekosistem digital, arus informasi yang terus diperbarui membuat pengguna mudah berpindah dari satu kabar ke kabar lain.

Bukan Sekadar Berpikir Positif

Bloomscrolling menawarkan pendekatan yang berbeda dengan mendorong pengguna memilih konten yang membantu memperbaiki suasana hati. Cerita tentang orang yang

juga membantu, karya seni, video alam, atau aktivitas yang membangun keterampilan dapat menjadi alternatif ketika seseorang membutuhkan hiburan setelah menjalani hari yang melelahkan.

Konten tentang tindakan kebaikan juga dapat mengingatkan pengguna pada pengalaman positif di tengah banyaknya kabar buruk. Namun, manfaatnya tidak berarti setiap orang akan merasakan efek yang sama. Respons terhadap konten bergantung pada pengalaman, kebutuhan, dan kondisi masing-masing individu.

Bloomscrolling juga tidak seharusnya dimaknai sebagai tuntutan untuk selalu bahagia atau menghindari emosi negatif. Kesedihan, kemarahan, dan kekhawatiran tetap menjadi respons yang wajar terhadap situasi tertentu. Memilih konten positif dapat membantu menciptakan jeda emosional, tetapi bukan pengganti penyelesaian masalah atau bantuan profesional ketika dibutuhkan.

Cara Memulai

Langkah pertama adalah mengenali pengaruh media sosial terhadap suasana hati. Jika setelah membaca atau menonton sejumlah konten seseorang justru merasa semakin gelisah, ia dapat berhenti sejenak dan mengevaluasi apa yang sedang dikonsumsi. Pengguna juga bisa mengatur linimasa dengan mengikuti akun yang membagikan informasi bermanfaat, karya

kreatif, edukasi, hobi, atau kisah inspiratif. Sebaliknya, akun yang terus memicu tekanan emosional dapat dibatasi melalui fitur mute, unfollow, atau pengaturan rekomendasi konten.

Langkah berikutnya adalah menetapkan batas waktu penggunaan media sosial. Memilih konten positif tidak otomatis membuat scrolling menjadi sehat apabila aktivitas tersebut tetap menghabiskan waktu tidur, mengganggu pekerjaan, atau mengurangi interaksi langsung dengan orang lain.

Pengguna juga perlu tetap memeriksa sumber informasi dan membedakan fakta dari klaim yang belum terverifikasi. Konten yang terlihat menyenangkan belum tentu akurat, sehingga kebiasaan memilih konten positif tetap perlu berjalan beriringan dengan literasi digital.

Pada akhirnya, bloomscrolling bukan ajakan untuk menjauh dari seluruh berita buruk.

Kebiasaan ini mengingatkan bahwa pengguna memiliki ruang untuk menentukan bagaimana berinteraksi dengan media sosial. Dengan memilih konten secara lebih sadar, membatasi waktu layar, dan memberi ruang bagi aktivitas di luar dunia digital, scrolling dapat menjadi pengalaman yang lebih seimbang tanpa kehilangan kemampuan untuk memahami persoalan nyata di sekitar. (far,ist/dya)



Bunga Langka *Salvia Messi* di Andes Terancam Punah



spesies ini menghadapi ancaman serius di alam liar. "Spesies ini terancam punah terutama akibat dampak perubahan iklim yang ekstrem dan maraknya kebakaran hutan di wilayah Andes," kata Gonzales dalam laporan ilmiahnya.

Nama Messi dan Identitas Botani

Peneliti Argentina yang terlibat dalam studi tersebut, Rolando Uria, menjelaskan bahwa nama *Salvia messi* dipilih untuk menghormati Lionel Messi, yang dikenal atas konsistensi dan kemampuan beradaptasinya di lapangan.

"Kami ingin mengabadikan warisan dan keandalan sosok Lionel Messi di lapangan ke dalam nama tumbuhan yang memiliki kemampuan adaptasi luar biasa di lingkungan keras ini. *Salvia messi* secara harfiah bermakna 'tanaman Messi'," ujar Uria.

Dalam tata nama ilmiah, pemberian nama spesies mengikuti kaidah nomenklatur internasional. Nama yang merujuk kepada seseorang dapat dibentuk melalui penyesuaian Latin, termasuk penggunaan akhiran tertentu. Penamaan tersebut merupakan bentuk penghormatan, bukan penanda kepemilikan.

Fenomena penggunaan nama tokoh untuk spesies baru bukan hal asing dalam ilmu pengetahuan. Nama figur publik dapat membantu menarik perhatian masyarakat

terhadap keanekaragaman hayati yang belum banyak dikenal. Meski demikian, penemuan dan penamaan spesies harus didasarkan pada karakteristik biologis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Mengapa Tumbuhan Endemik Rentan?

Spesies endemik adalah organisme yang secara alami hanya ditemukan di wilayah geografis tertentu. Karena persebarannya terbatas, perubahan lingkungan di habitat tersebut dapat berdampak besar terhadap kelangsungan populasinya.

Kebakaran hutan dapat merusak vegetasi dan mengganggu regenerasi tumbuhan. Sementara itu, perubahan suhu dan pola curah hujan berpotensi mengubah kondisi habitat, ketersediaan air, serta waktu pertumbuhan dan pembungaan.

Bagi tumbuhan yang hanya hidup di kawasan tertentu, peluang berpindah ke habitat lain yang sesuai juga bisa terbatas. Karena itu, perlindungan kawasan tumbuh menjadi bagian penting dalam upaya konservasi spesies langka.

Tumbuhan dari genus *Salvia* diketahui memiliki kerabat dekat yang kaya akan senyawa aktif dengan potensi antioksidan dan antiinflamasi tinggi. Kendati demikian, kemiripan taksonomi dan potensi tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa *Salvia messi* memiliki tingkat khasiat medis yang persis sama. Karakteristik biokimia serta tingkat efektivitas spesifiknya tetap memerlukan uji fitokimia, uji klinis, dan penelitian ilmiah tersendiri secara komprehensif sebelum dapat diklaim memiliki manfaat terapeutik bagi kesehatan. (farist/dya)

Peneliti menamai tumbuhan endemik Peru dengan nama Lionel Messi karena warna bunganya menyerupai seragam Argentina. Namun, spesies yang mampu bertahan di lereng berbatu itu menghadapi ancaman perubahan iklim ekstrem dan kebakaran hutan.

Nama Lionel Messi kini diabadikan dalam dunia botani. Peneliti menemukan spesies tumbuhan langka bernama *Salvia messi* di Pegunungan Andes, wilayah tengah dan selatan Peru. Di balik penamaan yang terinspirasi pesepak bola Argentina tersebut, ada persoalan sains yang lebih mendasar: kelangsungan hidup spesies yang rentan di habitat alaminya. Mengutip The New York Times, tumbuhan ini termasuk famili Lamiaceae, kelompok yang juga

mencakup mint dan berbagai tanaman aromatik. Tingginya dapat mencapai 1,5 meter, dengan bunga berwarna biru muda dan putih yang mengingatkan pada warna seragam tim nasional Argentina.

Salvia messi tumbuh di lereng berbatu dan relatif kering pada ketinggian 2.000–2.400 meter di atas permukaan laut. Kemampuannya bertahan di lingkungan yang keras menjadi karakteristik menarik bagi peneliti. Namun, adaptasi tersebut tidak membuatnya kebal terhadap perubahan kondisi lingkungan.

Ketua tim penelitian dari Museum Sejarah Alam Universitas Nasional San Marcos, Paul Gonzales, menyebut



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan
TODAY

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **SIDOARJO:** TEGUH A | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** AIS | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **TRENGGALEK:** HERLAMBAH | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Makeup Flawless di Segala Usia Jangan Tutupi Semua Kerutan

Teknik makeup perlu menyesuaikan perubahan kulit seiring bertambahnya usia. Eksfoliasi, hidrasi, dan penggunaan produk bertekstur ringan dapat membantu riasan terlihat lebih segar tanpa menutupi tekstur alami wajah.

Perubahan kulit seiring bertambahnya usia membuat teknik makeup yang biasa digunakan saat muda belum tentu memberikan hasil serupa ketika usia bertambah. Kulit yang cenderung lebih kering, garis halus, hingga perubahan tekstur wajah perlu menjadi pertimbangan dalam memilih produk dan mengaplikasikan riasan.

Namun, mendapatkan tampilan makeup yang flawless bukan berarti harus menutupi setiap kerutan atau membuat permukaan kulit tampak tanpa cela. Persiapan kulit dan pemilihan produk yang tepat justru berperan penting agar riasan terlihat menyatu dengan wajah.

Mengutip The Guardian, sejumlah makeup artist membagikan kiat untuk menjaga tampilan makeup tetap segar di berbagai usia. Mulai dari eksfoliasi hingga penggunaan concealer, berikut beberapa hal yang bisa diperhatikan.

Eksfoliasi agar Kulit Segar

Makeup yang terlihat baik tidak hanya bergantung pada foundation atau bedak. Kondisi kulit sebelum dirias juga berpengaruh terhadap hasil akhir. Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah eksfoliasi untuk membantu mengangkat sel kulit mati yang menumpuk.

Makeup artist Kate Hughes menjelaskan, regenerasi sel kulit dapat melambat seiring bertambahnya usia. Penumpukan sel kulit mati dapat membuat wajah tampak kusam sehingga permukaan kulit terlihat

kurang segar ketika menggunakan makeup. Meski demikian, eksfoliasi tidak harus dilakukan setiap hari. Hughes menyarankan untuk memulainya sekitar satu kali seminggu bagi mereka yang belum terbiasa, kemudian menyesuaikan frekuensinya secara bertahap berdasarkan respons kulit.

Pemilihan metode eksfoliasi juga perlu memperhatikan kondisi kulit. Penggunaan produk yang terlalu kuat atau terlalu sering justru berisiko menyebabkan iritasi, terutama pada kulit yang kering atau sensitif. Karena itu, eksfoliasi sebaiknya dilakukan secara bertahap dan tidak dipaksakan jika kulit menunjukkan tanda-tanda iritasi.

Hindari Concealer Tebal di Bawah Mata

Area bawah mata membutuhkan perhatian tersendiri saat mengaplikasikan makeup. Seiring bertambahnya usia, kulit di bagian ini dapat menjadi lebih tipis dan kering sehingga garis-garis halus lebih mudah terlihat.

Makeup artist Bobbi Brown mengingatkan bahwa penggunaan concealer terlalu tebal berisiko membuat produk berkumpul di lipatan kulit. Alih-alih menyamarkan lingkaran hitam atau membuat area mata tampak lebih cerah, lapisan produk yang berlebihan justru dapat mempertegas tekstur kulit.

Untuk menghindarinya, persiapkan kulit dengan menjaga kelembapan sebelum menggunakan makeup. Pilih concealer dengan formula yang nyaman dan melembapkan, kemudian aplikasikan sedikit demi sedikit pada bagian yang membutuhkan koreksi. Kate Hughes juga menyarankan penggunaan

concealer secara bertahap agar hasilnya tetap menyatu dengan kulit. Jika masih diperlukan, tambahkan produk secukupnya daripada langsung menggunakan lapisan tebal.

Teknik ini membantu riasan terlihat lebih natural sekaligus mengurangi kesan berat pada area bawah mata.

Tak Perlu Menutupi Semua Kerutan

Garis halus dan kerutan merupakan bagian dari perubahan alami kulit. Karena itu, makeup tidak harus digunakan untuk menghilangkan seluruh tandapenuaan.

Bobbi Brown menyarankan pemilihan foundation berformula ringan agar tampilan kulit tetap natural. Penggunaan foundation dan bedak secara berlebihan dapat membuat tekstur kulit semakin terlihat, terutama ketika produk menumpuk pada garis-garis halus.

Alih-alih mengejar permukaan wajah yang sepenuhnya tanpa garis, makeup dapat digunakan untuk menonjolkan fitur wajah yang disukai. Misalnya, memberikan perhatian pada mata, membentuk alis, atau memilih warna bibir yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan penampilan.

Penggunaan produk secara secukupnya juga memungkinkan tekstur alami kulit tetap terlihat. Hasil makeup tidak harus menyerupai filter digital untuk disebut berhasil.

Sesuaikan Makeup dengan Kondisi Kulit

Selain tiga kiat tersebut, beberapa prinsip dasar dapat membantu menjaga hasil riasan tetap nyaman digunakan. Pertama, perhatikan hidrasi kulit sebelum makeup. Kulit yang terasa kering membutuhkan persiapan yang sesuai agar produk tidak mudah terlihat pecah atau

menumpuk. Gunakan pelembap yang cocok dengan kondisi kulit dan beri waktu agar produk menyerap sebelum mengaplikasikan riasan.

Kedua, gunakan foundation secara bertahap. Mulailah dengan lapisan tipis, lalu tambahkan produk hanya pada bagian yang membutuhkan daya tutup lebih tinggi. Cara ini membantu menghindari tampilan yang terlalu tebal.

Ketiga, gunakan bedak secukupnya. Bedak dapat membantu mengurangi kilap dan mengunci riasan, tetapi pemakaian berlebihan berpotensi membuat kulit tampak kering atau mempertegas tekstur. Fokuskan aplikasi pada area yang memang membutuhkan, seperti bagian wajah yang mudah berminyak.

Keempat, jangan lupakan tabir surya dalam rutinitas perawatan kulit pada pagi hari. Perlindungan terhadap sinar ultraviolet merupakan bagian penting dari perawatan kulit jangka panjang. Pilih tabir surya dengan perlindungan spektrum luas dan SPF minimal 30, lalu gunakan sesuai petunjuk produk.

Perlu diingat, kebutuhan kulit setiap orang berbeda. Usia bukan satu-satunya faktor yang menentukan teknik makeup yang tepat. Jenis kulit, kondisi kelembapan, sensitivitas, serta preferensi pribadi juga perlu dipertimbangkan.

Makeup yang baik pada akhirnya bukan tentang menyembunyikan usia, melainkan memahami kebutuhan kulit dan menggunakan riasan untuk mendukung penampilan.

Dengan persiapan yang tepat dan aplikasi yang tidak berlebihan, wajah dapat terlihat segar tanpa harus kehilangan tekstur alaminya. (far,ist/dya)

Dua Tahun Prabowo-Gibran dari Hal 1

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghadapi persoalan keamanan pangan. Di Kota Cirebon, Jawa Barat, sebanyak 270 orang dilaporkan mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan konsumsi makanan MBG hingga Rabu (21/10/2026). Sebanyak 231 orang di antaranya anak-anak, sedangkan 39 lainnya orang dewasa. Pada hari yang sama, 103 siswa SMPN 2 Cisarua, Kabupaten Bogor, juga mendapat penanganan medis setelah mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan program tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Siti Maria Listiawaty, mengatakan data 270 orang itu dihimpun hingga Rabu siang. Penanganan korban melibatkan delapan rumah sakit di Kota Cirebon. Sejumlah sekolah yang terdampak juga meliburkan kegiatan belajar untuk sementara.

Kasus di Cirebon bermula setelah penerima manfaat mengonsumsi menu MBG pada Selasa (20/10). Sejumlah korban mengalami gejala seperti mual, muntah, dan diare. Dugaan awal mengarah pada menu sup telur puyuh, tetapi penyebab pastinya belum dapat dipastikan karena masih menunggu pemeriksaan laboratorium.

Salah satu orang tua siswa, Dony Armando, mengatakan anaknya mulai mengalami gejala beberapa jam setelah mengonsumsi makanan tersebut. Ia mengaku mendapat cerita dari anaknya mengenai kondisi makanan yang dibagikan.

"Menurut pengakuan anak itu, sayur telur puyuhnya sudah bau. Pulang sekolah anak itu masih normal, tapi pas jam 3 itu sudah mulai mual dan muntah," kata Dony, dikutip Rabu (21/10).

Pernyataan tersebut merupakan kesaksian orang tua, bukan hasil pemeriksaan yang memastikan makanan sebagai penyebab keracunan. Sampel makanan perlu diperiksa untuk mengidentifikasi sumber masalah, termasuk kemungkinan kontaminasi bahan baku, pengolahan, penyimpanan, atau distribusi.

Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Ketut Sumedana, mengatakan lembaganya telah turun ke lapangan untuk menyelidiki kejadian di Cirebon. Namun, prioritas penanganan saat ini adalah pemulihan kesehatan para korban.

"Langkah yang kami lakukan masih fokus pemulihan kesehatan anak-anak kita," kata Ketut kepada Bloomberg Technoz, Rabu (21/10).

Ketut menyatakan BGN telah menjatuhkan sanksi penghentian operasional sementara atau suspend terhadap dapur yang terkait dengan kejadian tersebut. Untuk kasus yang



masuk kategori berat, BGN membuka kemungkinan sanksi lebih lanjut.

"Kalau di internal sudah langsung dilakukan suspend. Kategori berat tidak menutup kemungkinan menjadi suspend permanen atau pemutusan hubungan kerja sama dengan mitra/yayasan," ujarnya.

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Cirebon, Yulian Septa Pratama, mengatakan biaya penanganan medis korban akan ditanggung BGN. Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan dihentikan sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan dan evaluasi.

"Terkait penanganan ini, seluruh biaya akan ditanggung oleh BGN," kata Yulian.

Di Kabupaten Bogor, penanganan dilakukan terhadap 103 siswa SMPN 2 Cisarua yang mengalami gejala setelah mengonsumsi menu MBG. Kepala KPPG Bogor, Haidir, mengatakan operasional SPPG terkait dihentikan selama 20 hari untuk evaluasi dan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Dugaan awal mengarah pada susu, tetapi penyebabnya belum dipastikan.

Dua kejadian di wilayah berbeda itu kembali menempatkan keamanan pangan sebagai persoalan penting dalam pelaksanaan MBG. Pemerintah tidak hanya dituntut memperluas jangkauan program, tetapi juga memastikan makanan yang didistribusikan aman dikonsumsi, terutama oleh anak-anak.

Sehari Usai Janji Pembinaan

Persoalan keamanan pangan muncul ketika pemerintah justru tengah mengumumkan agenda pembinaan MBG. Pada Senin (19/10), Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi tingkat menteri untuk mengevaluasi penyelenggaraan program tersebut. Hasilnya disampaikan pada Selasa (20/10), sehari sebelum data terbaru dugaan keracunan di Cirebon muncut.

Zulkifli menyebut empat prioritas pembinaan, yakni mempercepat pemerataan layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T);

menata tata kelola SPPG; meningkatkan keamanan dan mutu makanan; serta memperbaiki data penerima manfaat dan meniadakan penyimpangan.

"Memasuki dua tahun pemerintahan, arahan Presiden MBG segera diimplementasikan secara merata, terutama di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Kekurangan harus dibenahi, tata kelola ditertibkan, dan penyimpangan kita tindak tegas," kata Zulkifli, dikutip ANTARA, Selasa (20/10).

Dalam agenda penataan dapur, pemerintah mensyaratkan SPPG memenuhi ketentuan operasional, termasuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), tidak sedang dikenai penghentian operasional, dan tidak pernah mengalami kejadian fatal sesuai kriteria yang ditetapkan dalam skema operasional terbaru.

Pemerintah juga menguji coba penyajian MBG secara prasmanan di 66 SPPG yang tersebar di 10 provinsi. Menurut evaluasi awal yang disampaikan pemerintah, metode tersebut berpotensi menjaga makanan tetap hangat, mengurangi sisa makanan, dan memperkuat edukasi gizi melalui keterlibatan guru serta siswa. Hasil uji coba akan dievaluasi sebelum penerapannya diperluas.

Namun, perubahan cara penyajian bukan satu-satunya aspek yang menentukan keamanan pangan. Prosedur pemilihan bahan baku, pengolahan, pengendalian suhu, kebersihan peralatan, penyimpanan, hingga ketepatan waktu distribusi tetap harus diawasi secara konsisten.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan lembaganya sedang menguji coba sistem pengawasan dapur menggunakan kamera pemantau atau CCTV yang terhubung ke pusat dan dibantu kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

"Jadi semua dapur itu sudah punya CCTV, hanya CCTV-nya belum (terkoneksi), hanya dikonsumsi oleh internal dari dapur itu. Sehingga kami sedang piloting, ada sekitar 70-an dapur yang kita piloting, untuk CCTV-nya kita tarik ke pusat, kita kasih artificial intelligence, sehingga kita bisa memonitor SOP. Apakah SOP

pengolahan, SOP persiapan, SOP cuci ompreng, dan sebagainya," kata Sudaryono dalam keterangan yang disampaikan Kemenko Pangan.

Melalui sistem tersebut, BGN berharap dapat memantau kepatuhan dapur terhadap standar operasional prosedur (SOP), mulai dari persiapan bahan dan proses pengolahan hingga pencucian perlengkapan makan. Pemerintah juga menyatakan akan memperkuat peran satuan tugas MBG di daerah dalam pemantauan dan pengawasan.

Meski demikian, efektivitas pengawasan berbasis kamera tetap bergantung pada kualitas pelaksanaan di lapangan, ketepatan respons terhadap temuan, serta tindak lanjut ketika terjadi pelanggaran. Rekaman CCTV tidak dengan sendirinya membuktikan keamanan makanan atau menggantikan pemeriksaan laboratorium.

Di sisi lain, skala program membuat pengawasan menjadi pekerjaan besar. Data BGN yang disampaikan melalui ANTARA mencatat 26.385 SPPG berstatus operasional dalam skema penataan terbaru. Pemerintah juga terus mengaktifkan dapur baru untuk memperluas jangkauan layanan, termasuk di wilayah 3T.

Perluasan tersebut harus berjalan seiring dengan kesiapan pengawasan dan standar keamanan pangan. Ketika satu dapur memasok makanan kepada banyak penerima manfaat, kelemahan dalam satu tahap produksi atau distribusi berpotensi berdampak terhadap banyak orang sekaligus.

Karena itu, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah porsi yang dibagikan, banyaknya dapur yang beroperasi, atau besarnya anggaran yang terserap. Indikator lain yang tak kalah penting adalah keamanan makanan, ketepatan sasaran, mutu gizi, kecepatan penanganan ketika terjadi insiden, serta kepastian pertanggungjawaban.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa angka kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan terjadi di sejumlah daerah masih dalam kategori "corridor of error" berdasarkan ilmu pengetahuan.

Kepala Negara menjelaskan, dari 1,4 miliar porsi makanan yang telah dibagikan, kasus keracunan yang tercatat sekitar 8.000, atau secara statistik hanya 0,0007 persen.

"Kalau 1,4 miliar dibagi 8.000, saya kira kalau dalam ilmu pengetahuan dalam sains ini masih dalam koridor katakanlah corridor of error," kata Presiden saat menghadiri Sidang Senat Terbuka di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Trans Convention Centre, Kota Bandung Jawa Barat, Sabtu (18/10/2025). (wid, ant, ist, kum/dya)

USUL LUHUT KERUGIAN NEGARA BUKAN KORUPSI BERJUNG POLEMIK

Usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengenai unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi memicu penolakan dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah pernyataannya menuai polemik, DEN mengklarifikasi bahwa rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto itu tidak bermaksud menghapus kerugian negara sebagai unsur tindak pidana korupsi, melainkan memperjelas pembuktian dan memperluas jenis delik korupsi.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan lembaganya tidak setuju jika unsur kerugian negara dihilangkan sepenuhnya. Ia menilai, jika pemerintah ingin menyelaraskan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dengan Konvensi PBB Antikorupsi atau United Nations Convention against Corruption (UNCAC), ada ketentuan lain yang justru mendesak untuk dimasukkan ke dalam hukum nasional.

Setyo mengakui terdapat perbedaan rumusan antara UNCAC dan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor Indonesia. Namun, menurut dia, kekhususan sistem hukum nasional perlu dipertimbangkan dengan melihat modus korupsi yang terjadi di Indonesia.

“Memang persyaratan kerugian negara di UNCAC beda tafsir dengan Pasal 2 dan 3 (UU Tipikor),” kata Setyo, Rabu (21/10/2026).

Dalam pernyataan berikutnya, Setyo menegaskan sikap kelembagaan KPK lebih tegas. Lembaga antirasuah itu menolak penghapusan total unsur kerugian negara dan mendorong agar ketentuannya tetap dipertahankan dalam UU Tipikor.

“Kajian KPK tidak setuju bila unsur kerugian negara dihilangkan total,” ujar Setyo.

Ia menyebut frasa kerugian negara dalam KUHP baru perlu dipertahankan dan dikembalikan sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam UU Tipikor, dengan merujuk rekomendasi KPK dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, ketentuan tersebut diperlukan untuk menghadapi modus operandi korupsi yang semakin rumit.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga menyatakan kerugian keuangan negara telah diatur dalam UU Tipikor dan diakomodasi dalam KUHP Nasional melalui Pasal 603 dan Pasal 604. Ia menilai penguatan pemberantasan korupsi perlu diarahkan pada tindak pidana yang tercakup dalam UNCAC tetapi belum diatur secara memadai dalam hukum Indonesia.

KPK mengidentifikasi empat jenis tindak pidana yang perlu mendapat perhatian. Pertama, *foreign bribery* atau penyuapan terhadap pejabat publik asing. Kedua, suap di sektor swasta. Ketiga, *trading in influence* atau perdagangan pengaruh. Keempat, *illicit*



Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersama jajaran DEN usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Dok

enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar.

Setyo menilai, jika UNCAC dijadikan acuan untuk memperbarui UU Tipikor, penyelarasan semestinya tidak berhenti pada perdebatan mengenai kerugian negara. Penambahan empat jenis delik tersebut, menurut KPK, justru mendesak untuk memperluas jangkauan pemberantasan korupsi.

Polemik bermula setelah Luhut menyampaikan rekomendasi DEN sesuai bertemu Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Sehari kemudian, Luhut menyebut Presiden menyetujui kajian tim DEN mengenai definisi korupsi. Ia beralasan, rumusan korupsi dalam UNCAC yang telah diratifikasi Indonesia tidak menjadikan kerugian negara sebagai unsur delik dengan rumusan serupa Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

“Nah, itu kami mengacu kepada UN Convention Chapter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi di UN Chapter yang sudah diratifikasi oleh pemerintah 20 tahun yang lalu adalah bribery, penyuapan, jadi tidak bicara mengenai kerugian negara,” kata Luhut, Rabu (21/10/2026).

Luhut juga menyatakan Indonesia menjadi satu-satunya negara yang menerapkan unsur kerugian negara dalam penanganan korupsi. Menurut dia, ketentuan tersebut dapat memberatkan aktivitas bisnis perusahaan negara, termasuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), karena setiap kegiatan usaha memiliki risiko.

“Karena Indonesia adalah satu-satunya negara yang menerapkan

masalah kerugian negara. Ini memang memberatkan kepada, seperti Danantara untuk membuat bisnis, yang tentu setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya. Maka ini saya kira penting,” ujarnya.

Tanak mencontohkan perkara korupsi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), yang menurut dia memperlihatkan bagaimana uang negara dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, pihak lain, atau korporasi.

Ia juga menegaskan UNCAC tidak melarang negara anggota mengatur tindak pidana korupsi sesuai sistem hukum masing-masing. Karena itu, persoalan risiko bisnis perusahaan negara, menurut Tanak, dapat ditangani melalui pengaturan di sektor BUMN tanpa harus menghapus unsur kerugian negara dari UU Tipikor.

Tanak merujuk Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur perlindungan bagi direksi dalam kondisi tertentu. Ia menilai pemerintah dapat memperjelas perlindungan hukum bagi pengambil keputusan bisnis melalui regulasi terkait, bukan dengan menghilangkan ketentuan kerugian negara dalam hukum pemberantasan korupsi.

Setelah pernyataan awal Luhut menuai kontroversi, DEN mengeluarkan klarifikasi tertulis pada Rabu (21/10/2026). Lembaga tersebut menegaskan rekomendasi penyempurnaan UU Tipikor tidak menghapus kerugian keuangan negara

DATA KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI

ICW · Pemantauan 2024

RP 279,9 TRILIUN

Potensi kerugian negara dari perkara korupsi yang ditindak aparat penegak hukum selama 2024. Naik 885,2% dibandingkan Rp28,4 triliun pada 2023.

Kasus timah · Data ICW

RP 271 TRILIUN

Sekitar 96,8% dari total potensi kerugian negara yang dicatat ICW pada 2024 dikaitkan dengan perkara tata niaga timah PT Timah Tbk.

Kejaksan Agung · Capaian 2024

RP 310,61 TRILIUN

Nilai kerugian negara akibat dugaan korupsi yang dilaporkan Kejaksaan, ditambah US\$7,88 juta dan 58,135 kilogram emas. Angka ini memiliki cakupan dan metode pencatatan berbeda dari ICW.

KPK · Perkara digitalisasi SPBU

RP 322,18 MILIAR

Dugaan kerugian negara dalam proyek digitalisasi SPBU Pertamina periode 2018–2023, berdasarkan pemberitaan Tirto pada Agustus 2026.

dari rumusan tindak pidana korupsi.

DEN menyatakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP tetap dipertahankan. Pertanggungjawaban pidana dan pemulihan kerugian keuangan negara juga tetap berlaku. Bagian yang ingin disempurnakan adalah cara membuktikan unsur-unsur tindak pidana, bukan keberadaan unsur kerugian negara.

“Yang kami usulkan adalah agar pembuktiannya jelas dan objektif, sehingga pelaku korupsi tidak lolos, dan seseorang yang mengambil keputusan atau tindakan dengan iktikad baik tidak dipidana tanpa dasar,” kata Luhut dalam keterangan tertulis. Menurut DEN, rekomendasi tersebut memiliki dua arah. Pertama, memperjelas pembuktian agar penegakan hukum lebih pasti, objektif, dan konsisten. Kedua, memperluas jangkauan pemberantasan korupsi dengan mengadopsi delik UNCAC yang belum diatur dalam hukum nasional, termasuk penyuapan terhadap pejabat publik asing. (tin,rls,ant,kum/dya)